

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Busroh Abu Daud, *Ilmu Negara*, Jakarta: Cetakan Pertama, Bumi Aksara, 1990
- Hasan Ibrahim Hasan, *Al-Nuzmu Al-Islamiyah*, Kairo: Mathba'ah Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1953
- Huda, Ni'matul, *Ilmu negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014. 207-208.
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 7
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 113
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenamedia Group, 2014
- Ishaq, *Dasar-dasar ilmu negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, 244.
- Gaffan, Affar, *Otonomi Daerah dalam negara kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kedesama, 2009, 294.
- Muslim Asep, *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 42
- Mustamin, *Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah* (Bone: CV Mario Sulfana, 2018), 140
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 1.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992), 9.
- Suprihatin, Amin. *Pemerintah Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

- Suryaningrat, Bayu, *Pemerintahan Administrasi dan Kelurahan*, Jakarta: Aksara Baru, 1985
- Solekhan, Moh, MAP, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Pres, 2014
- Sudjono, *Buku Pintar Pemerintah Desa*, (Jakarta: DPN Parade Nusantara 2012), 20
- Soekanto Soedjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999),
- Undang-Undang, Desa, Kelurahan Dan Kecamatan*, Bandung: Fokusmedia, 2014
- Triwulan, Tutik Titik, “ *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945*”. Jakarta : Prenadamedia Group, 2010.
- Waluyo, Bambang , *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

B. SKRIPSI DAN JURNAL

- Asrul, “Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Palongki Kabupaten Bone)” (2020)
- Erga Yuhandra. “Kewenangan Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi”. *Jurnal Unifikas*, 3: 2 (Juli 2016), 6
- Haposan siallagan “Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia” *Sosiohumaniora*, 18:2 (Juli 2016):1
- Ismanudin dan Ilham Setiawan ”Model Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021: Studi Kasus Di Kabupaten Indramayu” *jurnal aspirasi* 12:1 , 2022
- Janpatar Simamora, “Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012”, *Jurnal Yudisial*, 6:2, (Agustus 2013), 124
- Putra, B. A. “Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa”.,Kumpulan *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1:1 (2015), 1

- Riskiono Joko “ Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019”. *Jurnal Dpr*, 10:2, 2019
- Risidiana Izzaty dan Xavier Nugraha, “Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap”, *Jurnal Suara Hukum*, 1:2, (September 2019), 158
- Supardal Udiyati Ardiani “Evaluasi Stuktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta”. *Journal of Indonesia Rural And Regional Government*. 5:2 (2021) 148-162.
- Sardjana Orba Manullang, Megasuciati Wardani, Sitti Nur Alam, Sri Sudono Saliro “Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan”. *Legalitas: Jurnal Hukum* 12:1, 2020
- Siti Mariana Benga Payon, Saryono Yohanes, Hernimus Ratu Udju “ Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kolilanang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur”. *Artemis law journal* 01: 01 (November 2023)
- Sipayung Rismanto and Dani Sintara, “Analisis Hukum Terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Bandar Bayu Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 4 (2023).
- Saputra, Edwin. “Implementasi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)” (2013).
- Tilar Anggun Safitri “Sistem Pemilihan Kepala Desa Di Bayalangu Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara PEMILIHAN KUWU” *Samudra Law Journal (SAMLON)* 1:1, 2024
- Umni Natjah, Afriva Khaidir “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Demokrasi Desa”. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*.1:4 2019, 58:66.
- Wardhani Primandha Sukma Nur, “Partisipasi Politik Pemula dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10:1 (2018),58

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 32 Tahun 2004 Desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadatnya

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 pasal 53 ayat 2 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 36

Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 1 angka 19

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu



D. INTERNET

Arti Kata Daftar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 28 Januari 2024, diakses dari <https://kbbi.lektur.id/daftar>

Arti Kata Daftar di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 28 Januari 2024, diakses dari <https://kbbi.lektur.id/daftar>

Arti Kata Pemilih di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lektur.id, diakses pada 5 Januari 2024, diakses dari <https://kbbi.lektur.id/pemilih>

Arti Kata Pemilih di Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 28 Desember 2023, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemilih>

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) di NTB, ntbprov.go.id, diakses pada 2 Januari 2024, diakses dari <https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-daftar-pemilih-tetap-dpt-di-ntb>
- <https://Eprints.Uny.Ac.Id/8543/3/BAB%20%20-%2008401241005.Pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 12:00 WIB.
- <http://Eprints.Umpo.Ac.Id/3782/3/BAB%20II.Pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 22:00 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 5 Januari 2024, diakses dari <https://kbbi.web.id/daftar>
- Kartika, “DPT Harus Valid, dan Komprehensif,” bawaslu.go.id, 22 November 2018, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dpt-harus-valid-mutakhir-dan-komprehensif>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 1 Januari 2024, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/%20mutakhir>
- Supardi, Problematika Daftar Pemilih, bawaslu.go.id, diakses pada 31 Desember 2023, diakses dari <https://bantul.bawaslu.go.id/problematika-daftar-pemilih/>
- Supardi, Problematika Daftar Pemilih, bawaslu.go.id, diakses pada 6 Januari 2024, diakses dari <https://bantul.bawaslu.go.id/problematika-daftar-pemilih/>
- Zidni Iman Akmaluddin, contoh arti yuridis formal, diakses pada 1 februari 2024 dari <https://gurupkn.com/contoh-yuridis-formal>.